**ADA YANG ANEH DI KASUS SPPD FIKTIF MANTAN BUPATI DONGGALA**

**Partai Golkar Akan Dampingi Habir Ponulele**

PALU – Kasus dugaan SPPD fiktif yang melibatkan Mantan Bupati Donggala Drs. H. Habir Ponulele MM dan Mantan Wabup Aly Lasamualu SE Msi dinilai aneh oleh banyak pihak. Mantan Sekkab Donggala Drs. H. Kasmuddin Haluddin Msi angkat bicara mengenai kasus yang menimpa bekas atasannya itu. Dia menilai ada yang aneh dalam kasus tersebut, karena secara administrasi tidak ada masalah jika mengacu pada hasil pemeriksaan BPK. “Masalah ini kan sudah jelas melewati pemeriksaan BPK secara administrasi dan hasilnya bersih, buktinya Donggala WTP tiga kali. Hanya saja, BPK memang tidak memeriksa secara fisik,” jelasnya kepada Radar Sulteng, senin kemarin (10/11).

Akan tetapi lanjut Kasmuddin, jika benar adanya dugaan SPPD fiktif, maka kasus ini tidak bisa berdiri sendiri, yang hanya menjerat Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati Donggala, tetapi yang menjabat sebagai Kepala DPPKAD, H. Hasan Basri SE MM, yang juga pejabat pengelola keuangan daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) saat itu, diduga turut terlibat, karena yang tahu persis segala urusan keuangan daerah adalah Kepala DPPKAD Donggala saat itu. “Jadi aneh, kalau kasus ini hanya berdiri sendiri, karena ada keterlibatan pihak lain, dalam hal ini yang tahu persis soal keuangan daerah adalah Kepala DPPKAD Donggala saat itu,” jelasnya.

Namun Kasmuddin enggan berkomentar soal adanya dugaan tendensi politik dalam kasus tersebut. Dia hanya mengatakan, penegakan hukum tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, termasuk pelaku politik. “Mestinya, jangan hanya dari 2010 hingga 2013 disidik. Makanya kami anggap ada yang aneh di sini,” jelasnya.

Dia juga mengungkapkan keheranannya atas kasus tersebut, yang disidik secara gelondongan dari 2010-2013 dengan total nilai Rp1,3 miliar, yang dibagi masing-masing melibatkan Habir Ponulele senilai Rp897 juta dan Aly Lasamulu Rp560 juta. “Mestinya masalah SPPD ini terpisah setiap tahun anggaran, bukan gelondongan begitu. Kalau datanya hilang, maka harus diusut siapa yang menghilangkan data itu,” jelasnya.

Kasmuddin juga mempertanyakan soal dokumen rujukan dari tim penyidik dalam kasus tersebut. “Kalau dokumen resmi dari Pemkab Donggala yang jadi rujukan penyidik, maka harus ada berita acaranya,” tandasnya.

Sementara Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Sulteng berencana akan memberikan bantuan hukum kepada Mantan Bupati Donggala Drs. H. Habir Ponulele MM, yang merupakan kader terbaik Partai Golkar, Habir yang kini tersandung kasus hukum atas dugaan dana SPPD fiktif bersama Mantan Wabup Donggala Aly Lasamulu SE MSi adalah Ketua Partai Golkar Kabupaten Donggala. “Kami akan menyiapkan segala sesuatunya menyangkut keperluan yang dihadapi Pak Habir,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Sulteng, H Zainal Abidin Ishak kepada Radar Sulteng kemarin.

Menurut Zainal, dia melihat kasus yang kini sedang melanda Habir Ponulele, ada dua permasalahan mendasar, yaitu masalah hukum dan adanya dugaan sentimen politik dibaik penahanan tersebut. “Kami melihat dari permasalahan itu, ada dua pokok persoalan, yaitu masalah hukum dan masalah politik,” jelas anggota Komisi III DPRD Sulteng ini.

Tetapi untuk masalah politik katanya, perlu pengkajian lebih mendalam, dan harus ada bukti-bukti yang menguatkan dugaan itu. Namun untuk kasus hukumnya sendiri, Partai Golkar akan menyerahkan sepenuhnya kepada institusi hukum, dalam hal ini Kejaksaan. Agar permasalahn hokum ini penanganannya lebih baik, maka Partai Golkar akan berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak keluarga. “Kami intens berkomunikasi dengan keluarga besar Pak Habir. Bahkan kami akan menawarkan kepada keluarga untuk menggunakan advokat mendampingi beliau dalam menghadapi proses hukum lebih lanjut,” tambahnya.

Ditanya apakah Partai Golkar akan mendampingi kadernya itu dengan memanfaatkan beberapa orang pengurus DPD I Partai Golkar Sulteng yang berlatar belakang advokat seperti Amat Entedaim SH. Sekali lagi, Mantan Ketua DPRD Morowali itu berkelit, bahwa partai beringin itu masih akan menajamkan komunikasi dengan keluarga. “ Nanti keluarga yang akan memilih, apakah memanfaatkan advokat Partai Golkar atau Partai Golkar yang akan menyewa advokat lain,” tandasnya.

**Sumber Berita:**

Mercusuar, 07 November 2014

i Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah (Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)

iii Bendahara Umum Daerah (BUD), adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah (Pasal 1 Angka 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)